

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Kemiskinan merupakan gambaran kehidupan di banyak negara berkembang yang mencakup lebih dari satu milyar penduduk dunia. Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara dan situasi global. Globalisasi ekonomi dan bertambahnya ketergantungan antar negara, tidak hanya merupakan tantangan dan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan suatu negara, tetapi juga mengandung resiko dan ketidakpastian masa depan perekonomian dunia. Menurut Kunarjo dalam Badrul Munir (2002:10), suatu negara dikatakan miskin biasanya ditandai dengan tingkat pendapatan perkapita rendah, mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi (lebih dari 2 persen per tahun), sebagian besar tenaga kerja bergerak di sektor pertanian dan terbelenggu dalam lingkaran setan kemiskinan.

Kemiskinan menurut Bappenas (2006) adalah terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi, terbatasnya akses terhadap air bersih, lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, lemahnya jaminan rasa aman, lemahnya partisipasi dan besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga.

Pendapat lain dikemukakan oleh Gonner (2007), bahwa kemiskinan dimaknai sebagai kurangnya kesejahteraan dan kesejahteraan sebagai kurangnya kemiskinan. Artinya kemiskinan diterjemahkan sebagai menurunnya kesejahteraan. Keduanya saling terkait dan memandang masalah yang sama dari dua dimensi yang berbeda. Definisi yang luas dari kemiskinan ini adalah kurangnya kesejahteraan, dimana ada saling tukar dalam konsep ini (Case & Fair, 2010).

Sajogyo dalam Hadi Prayitno & Lincoln Arsyad (1987), menyatakan bahwa kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat, berdasarkan atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi.

Lebih lanjut dinyatakan oleh Sajogyo dalam Bagong Suyanto (2013) telah membuat suatu batasan atau klasifikasi kemiskinan sebagai berikut:

- a. Untuk daerah perkotaan, seseorang disebut miskin apabila mengkonsumsi beras kurang dari 420 kg per tahunnya.
- b. Untuk daerah pedesaan, seseorang disebut miskin apabila mengkonsumsi beras 320 kg, miskin sekali apabila mengkonsumsi beras 240 kg dan paling miskin apabila mengkonsumsi beras kurang dari 180 kg per tahunnya.

Adapun Mubyarto (1998) memberikan definisi kemiskinan adalah suatu situasi serba kekurangan dari penduduk yang terwujud dalam bentuk rendahnya pendapatan dan disebabkan oleh rendahnya keterampilan, produktivitas, pendapatan, lemahnya nilai tukar produksi dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan.

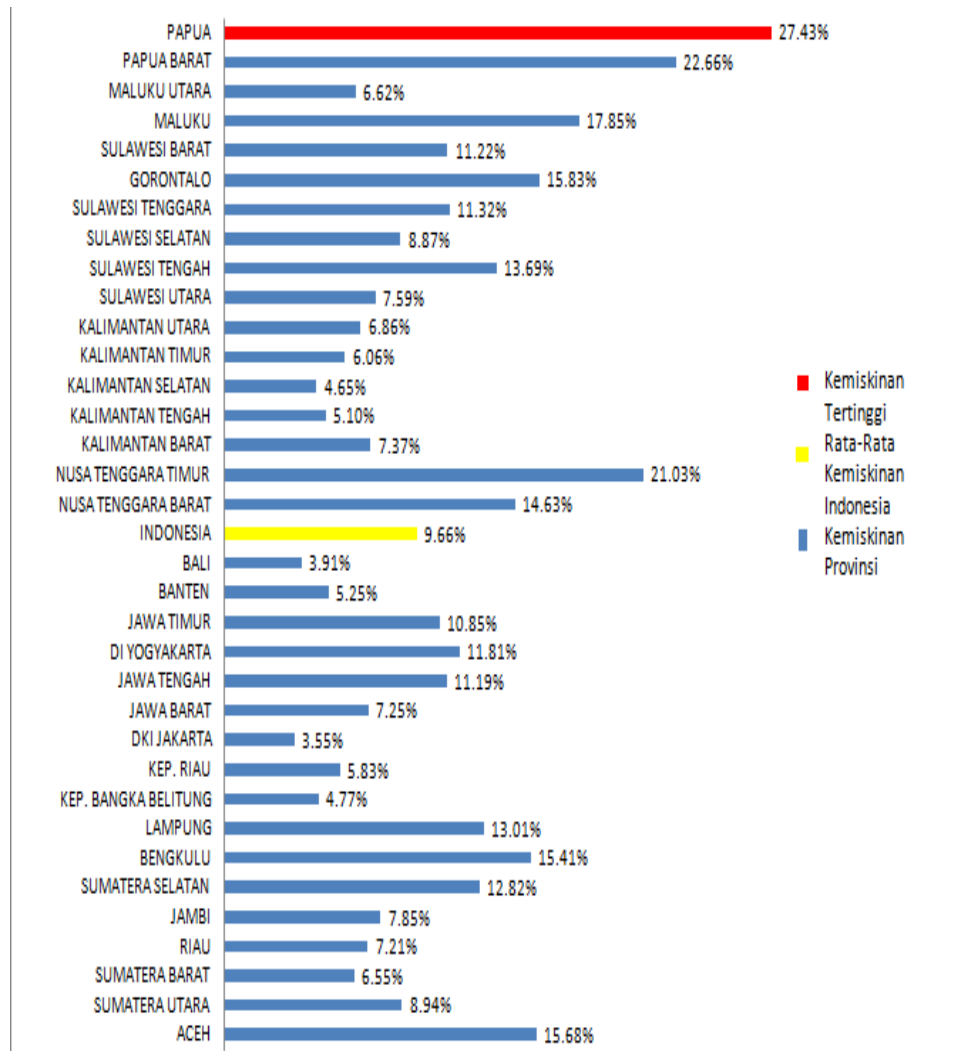
Dan untuk mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia ada beberapa indikator yang harus digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan pada suatu daerah atau wilayah tertentu diantaranya menurut Badan Pusat Statistik (BPS) antara lain:

1. Kondisi rumah tinggal,
2. Fasilitas rumah tinggal,
3. Raskin
4. BPNT
5. Jaminan sosial
6. Penerima PKH
7. Kredit
8. Aset

Sementara itu kemiskinan di Indonesia bukanlah hal yang baru, bahkan sudah dikenal dan diselidiki oleh pemerintah Kolonial Belanda sejak awal abad 20. Kemiskinan merupakan hal yang klasik yang belum terselesaikan di negara-negara berkembang, dimana kemiskinan menjadi masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian di setiap negara. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional.

Upaya untuk mengurangi kemiskinan harus dilakukan secara komperhensif yang mencakup seluruh aspek-aspek kehidupan dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil pembangunan (Soegijoko, 2001).

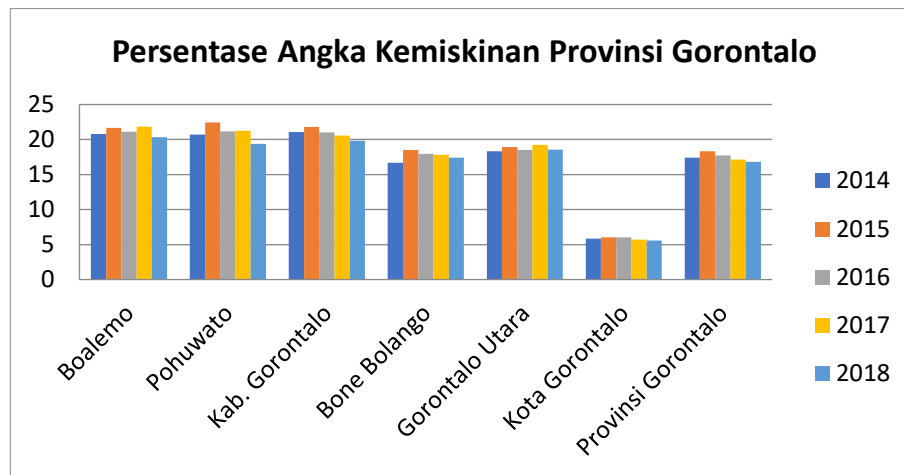
Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 13,47 persen, turun menjadi 13,20 persen pada bulan Maret 2018. Selama periode September – Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 128,2 ribu orang (dari 10,27 juta orang pada September 2017 menjadi 10,14 juta orang pada Maret 2018), sementara di daerah pedesaan turun sebanyak 505 ribu orang (dari 16,31 juta orang pada September 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018). Menurut pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan serta program pembangunan dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional 2018

Grafik 1.1 Persentase Angka Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia September 2018

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa, angka rata-rata kemiskinan di Indonseia tahun 2018 sebesar 9,66%. Untuk angka rata-rata kemiskinan tertinggi dari 33 provinsi di Indonsia pada tahun 2018 yaitu Provinsi Papua dengan nilai sebesar 27,43%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Papua sangat tinggi. Sementara tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2018 sebesar 15,83%, angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo ini berada diatas rata-rata tingkat kemiskinan nasional.



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo 2019

Grafik 1.2 Tren Kemiskinan Pada Provinsi Gorontalo

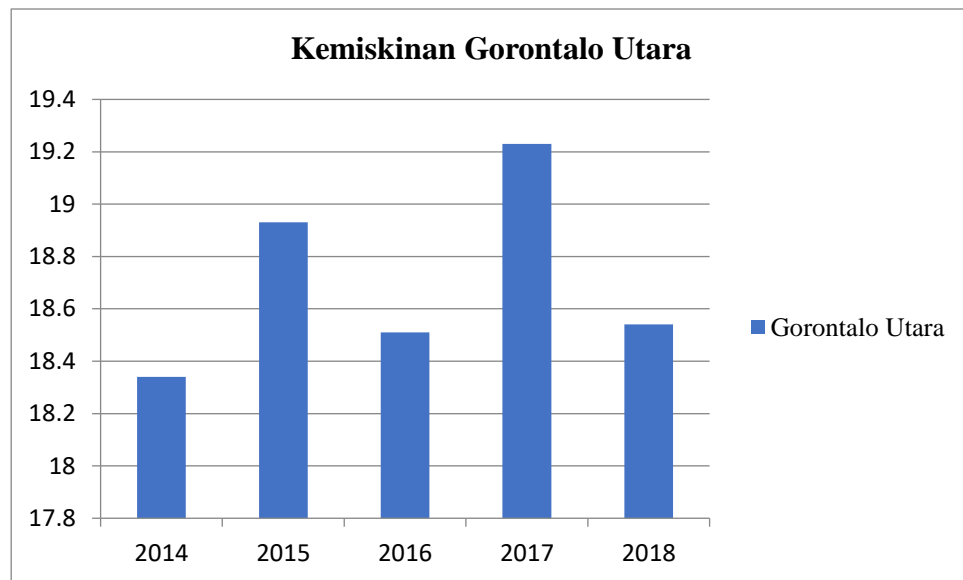
Berdasarkan gambar 1.2 diatas terlihat bahwa, setiap Kabupaten di Provinsi Gorontalo memiliki persentase angka kemiskinan diatas rata-rata dari Provinsi Gorontalo. Sedangkan persentase angka kemiskinan di Kota Gorontalo berada dibawah rata-rata dari Provinsi Gorontalo. Dimana angka persentase kemiskinan Provinsi Gorontalo tahun 2014-2018 mengalami fluktuatif atau naik turun. Di tahun 2014 angka persentase kemiskinan Provinsi Gorontalo sebesar 17,41%, di tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 18,31%, pada tahun 2016-2018 angka persentase kemiskinan ini menurun. Dimana pada tahun 2016 sebesar 17,72% dan pada tahun 2018 turun sampai diangka 16,81% lebih rendah dari tahun 2017 yang sebesar 17,14%.

Provinsi Gorontalo adalah salah satu provinsi yang sedang berkembang di Indonesia. Provinsi ini terdiri dari 6 Kabupaten/Kota. Menurut Badan Pusat Statistik, secara umum tingkat kemiskinan di Gorontalo mengalami penurunan secara konsisten selama 2014-2018 baik dalam jumlah maupun dalam persentase.

Salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Gorontalo yakni Kabupaten Gorontalo Utara. Kabupaten ini terdiri dari 11 kecamatan dan 123 desa dengan

jumlah penduduknya sebanyak 104,133 jiwa (data SP 2010) serta luas 1.230,07 km² (data SP 2010, sehingga tingkat kepadatan penduduknya adalah 84,60 jiwa/km²). Di Kabupaten Gorontalo Utara tingkat kemiskinan mengalami fluktuatif dari tahun 2014-2018. Ini disebabkan oleh program-program penanggulangan kemiskinan nasional yang dibuat tidak efektif karena tidak mencapai sasaran yang sebenarnya. Penyebab tidak efektifnya program tersebut disebabkan oleh gagalnya mengidentifikasi kondisi kemiskinan di daerah tersebut.

Salah satu tantangan besar bagi daerah ini terutama pada tingkat provinsi dan daerah kabupaten yang baru dimekarkan (Gorontalo Utara) adalah peningkatan penanggulangan kemiskinan di daerah ini. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah dan masyarakat terutama dalam menyangkut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Grafik 1.3
Tren Keemiskinan Kabupaten Gorontalo Utara

Berdasarkan gambar 1.3 diatas terlihat bahwa, pada tahun 2014-2018 kemiskinan di Gorontalo Utara mengalami fluktuatif atau turun naik. Di tahun 2014 angka persentase kemiskinan Gorontalo Utara sebesar 18,34%, di tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 18,93%, pada tahun 2016-2018 angka persentase kemiskinan ini menurun. Dimana pada tahun 2016 sebesar 18,51% dan pada tahun 2018 turun sampai diangka 18,54 lebih tinggi dari tahun 2017 yang sebesar 19,23%.

Apabila dikaji terhadap faktor penyebabnya, maka terdapat kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh pembangunan yang belum seimbang dan hasilnya belum terbagi merata. Sedangkan kemiskinan kultural mengacu kepada gaya hidup dan budayanya seseorang.

Bila dilihat dari kategori garis kemiskinan makanan dan non makanan bahwa Kabupaten Gorontalo Utara masuk pada garis kemiskinan makanan dimana sebagian besar penduduk Kabupaten Gorontalo Utara terdapat penduduk miskin contohnya masyarakat dalam memenuhi semua kebutuhan pokoknya masih sulit

untuk dipenuhi oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara, dengan memenuhi 2100 kalori saja masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara masih bersusah payah dalam memenuhinya dalam kehidupan sehari-hari.

Hal ini disebabkan oleh ketidaksamaan kesempatan dalam berusaha dan memperoleh pendapatan akan menyebabkan keikutsertaan dalam pembangunan yang tidak merata. Faktor penyebabnya, dapat dipastikan jika kemiskinan di pedesaan lebih besar dibandingkan di daerah perkotaan. Realitas kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara melahirkan banyak implikasi. Strategi penanggulangan kemiskinan yang digagas oleh TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) di tingkat Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2014-2018 terbukti belum cukup ampuh untuk menurunkan angka kemiskinan.

Melihat latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis akan mencoba melakukan penelitian dengan mengarahkan kepada konsepsi Kondisi Kemiskinan Absolut yang terjadi di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara. Adapun yang menjadi judul penelitian **“Analisis Kondisi Kemiskinan Absolut di Kabupaten Gorontalo Utara”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara cukup tinggi.
2. Berbagai program-program penanggulangan kemiskinan lokal yang dibuat belum efektif.

3. Ketidaktepatan dalam intervensi kemiskinan salah satunya disebabkan oleh adanya ketidaksepahaman dalam penggunaan indikator untuk menentukan sasaran intervensi.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kondisi kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui gambaran kondisi kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian diatas adapun manfaat dari pada penelitian tentang kondisi kemiskinan absolut di Kabupaten Gorontalo Utara, dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Teoristis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan, wawasan dan bermanfaat bagi orang lain. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian berikutnya yang sama.

2. Praktis

a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Ekonomi.

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan program penanggulangan kemiskinan, sehingga mampu memberikan kebijakan yang berkesinambungan.